

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data mengenai Kompleksitas Pemerintah, Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Intern tahun 2016-2018 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa **Kompleksitas Pemerintah berpengaruh signifikan positif** terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini dapat diterima, sehingga Kompleksitas Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simanjuntak (2016) yang menyatakan bahwa Kompleksitas Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern.
2. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa **Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern**. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini tidak dapat diterima, karena hipotesis penelitian menyebutkan bahwa Ukuran Pemerintah berpengaruh positif

terhadap Kelemahan Pengendalian Intern sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Simanjuntak (2016) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern.

3. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa **Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern**. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat diterima, karena hipotesis penelitian menyebutkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2015) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern.
4. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa **Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern**. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini dapat diterima, sehingga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Melani (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern.

5. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa **Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern**. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini tidak dapat diterima, karena hipotesis penelitian menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Simanjuntak (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern.
6. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa **Belanja Modal berpengaruh signifikan negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern**. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini tidak dapat diterima. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Melani (2017) yang menyatakan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern.

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguji kembali pengaruh kompleksitas pemerintah, ukuran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan data penelitian yang berbeda yaitu tahun 2016-2018. Kompleksitas Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap

Kelemahan Pengendalian Intern. Sedangkan Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh signifikan negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Intern.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jurnal mengenai pengaruh kompleksitas pemerintah, ukuran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian intern masih jarang ditemukan.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

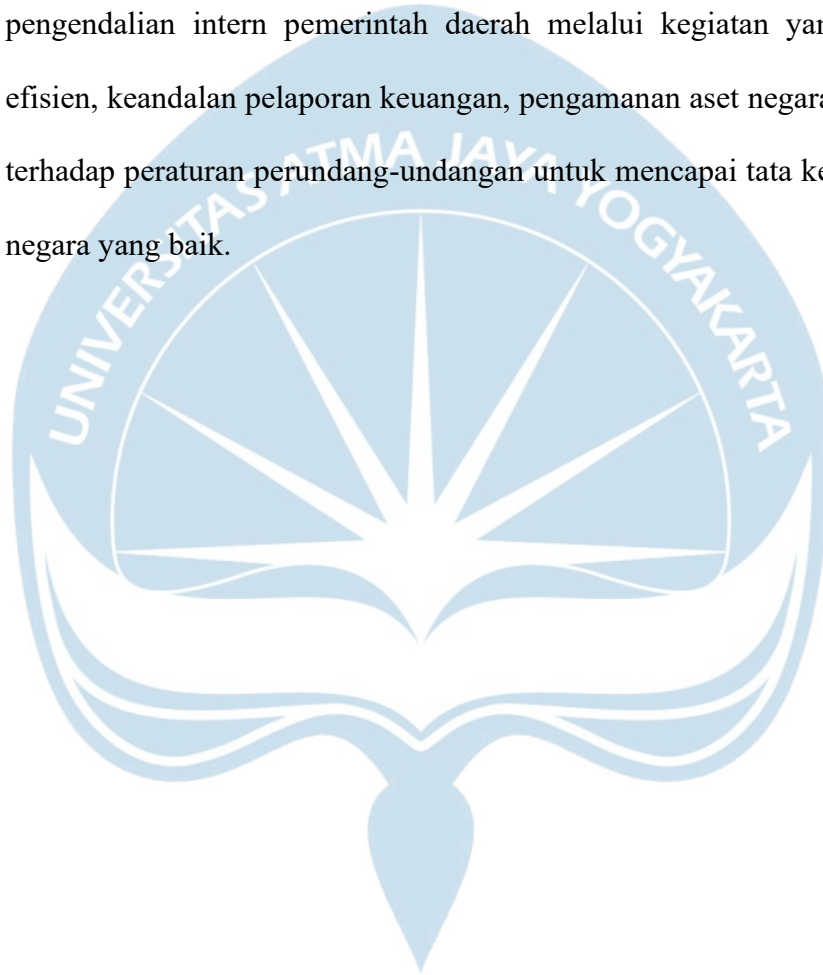
1. Sehubungan dengan variabel kompleksitas Pemerintah yang berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern diperlukan langkah-langkah penguatan kapasitas terhadap pemerintah daerah terutama pada tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terendah dalam pemahaman tata kelola penggunaan anggaran dan peraturan perundangan yg berkaitan dengan penggunaan anggaran serta tata cara pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah ini dapat dilakukan melalui berbagai

kegiatan diantaranya adalah sosialisasi, kegiatan pelatihan dan *on the job training* yang berkaitan dengan pedoman tata kelola pelaksanaan penggunaan anggaran daerah yakni SOP (*Standart Operating Procedure*), tata cara pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan serta peraturan perundangan yang melekat pada penggunaan anggaran daerah.

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern untuk itu diperlukan perbaikan sistem monitoring dan pengendalian secara terintegrasi terutama pada pintu arus masuk kas di setiap sumber-sumber pendapatan daerah, digitalisasi sistem pembayaran retribusi dan inventarisasi serta sentralisasi data asset daerah yang produktif serta basis data wajib pajak daerah, juga tak kalah pentingnya memperbaiki tata kelola dan monitoring pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai contoh semisal digitalisasi penarikan retribusi toko/kios yang merupakan asset daerah dengan cara auto debet rekening bank setiap bulannya untuk meminimalisir kebocoran dan efisiensi pemungutan retribusi, pembuatan aplikasi E-samsat untuk mengoptimalkan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), melalui aplikasi ini dapat terdata semua wajib pajak yang ada serta tunggakan pajak yang ada, juga dimungkinkan untuk menyusun rencana pendapatan dari pajak kendaraan

bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang optimal dengan adanya basis data wajib pajak yang update dan faktual.

3. Bagi pemerintah Kabupaten/kota diharapkan dapat lebih meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah daerah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mencapai tata kelola keuangan negara yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Boediono (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gudono. (2009). *Teori Organisasi*. Sleman: Pencil Press.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Hartono, R. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan, Size, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia Tahun 2011*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Hoesada (2020). *Teori Keagenan*. Majalah Maya KSAP, Edisi 1 Oktober 2020, Komite Standar Akuntansi pemerintahan. <http://www.ksap.org/sap/teori-keagenan/>
- Jhingan. (1996). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Krismiaji. (2002). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Melani, R. D. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung.
- Mulyadi. (2002). *Auditing* (Edisi 6), Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Puspitasari, T. (2013). *Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Kompleksitas Pemerintah Daerah (Jumlah Skpd) Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- Putri, N. K. (2015). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Saputro, E. A. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Seran, S. (2016). *Pendidikan & Pertumbuhan Ekonomi Versus Kemiskinan Penduduk (Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Simanjuntak, D. N. I. (2016). *Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kompleksitas Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi di Indoensia Tahun 2012-2014*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 319
- Sudjono dan Hoesada. (2009). *Strategi Penerapan Pereturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Majalah Akuntansi Indonesia, Edisi No. 15.
- Sularno., Megawati. F. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Modal: Studi Kasus pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.
- Tuanakotta, T. M. (2009). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang undang nomor 10 tahun 2010 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

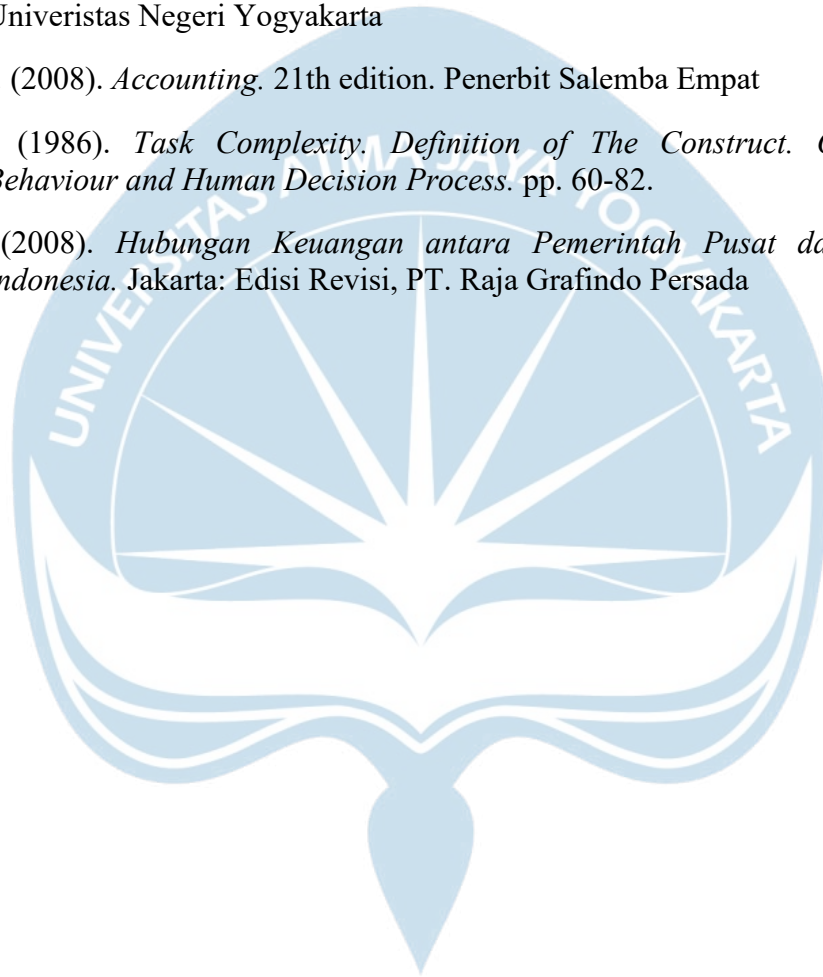
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wandira, A. G. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta

Waren. (2008). *Accounting*. 21th edition. Penerbit Salemba Empat

Wood. (1986). *Task Complexity. Definition of The Construct. Organizational Behaviour and Human Decision Process*. pp. 60-82.

Yani. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada



Referensi

- Bpk.go.id (2017, September). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 22 September 2020).
- Bpk.go.id (2018, Maret). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 22 September 2020).
- Bpk.go.id (2018, September). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 22 September 2020).
- Bpk.go.id (2019, Maret). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 22 September 2020).
- Bpk.go.id (2019, September). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 22 September 2020).
- Bpk.go.id (2020, Maret). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019*. (Diakses dari <https://www.bpk.go.id/ihps> tanggal 22 September 2020).
- Bps.go.id (2019, Desember). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2016-2019*. (Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2019> tanggal 21 September 2020)
- Djpk.kemenkeu.go.id (2016, 18 Januari). *Dana Alokasi Khusus*. (Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> tanggal 05 Oktober 2020).
- Djpk.kemenkeu.go.id (2017). *Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah*. (Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> tanggal 16 Desember 2021).

Lampiran 1
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010

No	Provinsi	Penduduk					
		1971	1980	1990	1995	2000	2010
1	Aceh	2.008.595	2.611.271	3.416.156	3.847.583	3.930.905	4.494.410
2	Sumatera Barat	2.793.196	3.406.816	4.000.207	4.323.170	4.248.931	4.846.909
3	Riau	1.641.545	2.168.535	3.303.976	3.900.534	4.957.627	5.538.367
4	Jambi	1.006.084	1.445.994	2.020.568	2.369.959	2.413.846	3.092.265
5	Bengkulu	519.316	768.064	1.179.122	1.409.117	1.567.432	1.715.518
6	Lampung	2.777.008	4.624.785	6.017.573	6.657.759	6.741.439	7.608.405
7	DI Yogyakarta	2.489.360	2.750.813	2.913.054	2.916.779	3.122.268	3.457.491
8	Banten	-	-	-	-	8.098.780	10.632.166
9	Bali	2.120.322	2.469.930	2.777.811	2.895.649	3.151.162	3.890.757
10	Nusa Tenggara Barat	2.203.465	2.724.664	3.369.649	3.645.713	4.009.261	4.500.212
11	Nusa Tenggara Timur	2.295.287	2.737.166	3.268.644	3.577.472	3.952.279	4.683.827
12	Kalimantan Barat	2.019.936	2.486.068	3.229.153	3.635.730	4.034.198	4.395.983
13	Kalimantan Tengah	701.936	954.353	1.396.486	1.627.453	1.857.000	2.212.089
14	Kalimantan Selatan	1.699.105	2.064.649	2.597.572	2.893.477	2.985.240	3.626.616
15	Kalimantan Timur	733.797	1.218.016	1.876.663	2.314.183	2.455.120	3.553.143
16	Sulawesi Utara	1.718.543	2.115.384	2.478.119	2.649.093	2.012.098	2.270.596
17	Sulawesi Tengah	913.662	1.289.635	1.711.327	1.938.071	2.218.435	2.635.009
18	Sulawesi Selatan	5.180.576	6.062.212	6.981.646	7.558.368	8.059.627	8.034.776
19	Sulawesi Tenggara	714.120	942.302	1.349.619	1.586.917	1.821.284	2.232.586
20	Gorontalo	-	-	-	-	835.044	1.040.164
21	Maluku	1.089.565	1.411.006	1.857.790	2.086.516	1.205.539	1.533.506
22	Maluku Utara	-	-	-	-	785.059	1.038.087
23	Papua Barat	-	-	-	-	-	760.422
24	Papua	923.440	1.173.875	1.648.708	1.942.627	2.220.934	2.833.381

Catatan : Termasuk Penghuni Tidak Tetap (Tuna Wisma, Pelaut, Rumah Perahu, dan Penduduk Ulang-alik/Ngelaju)

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995, BPS

<https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html>

Lampiran 2						
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi						
No	Provinsi	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun				
		1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2016 ²
1	Aceh	2,93	2,72	1,46	2,36	2,01
2	Sumatera Barat	2,21	1,62	0,63	1,34	1,31
3	Riau	3,11	4,30	4,35	3,58	2,59
4	Jambi	4,07	3,40	1,84	2,56	1,80
5	Bengkulu	4,39	4,38	2,97	1,67	1,69
6	Lampung	5,77	2,67	1,17	1,24	1,21
7	DI Yogyakarta	1,10	0,57	0,72	1,04	1,18
8	Banten	-	-	3,21	2,78	2,23
9	Bali	1,69	1,18	1,31	2,15	1,21
10	Nusa Tenggara Barat	2,36	2,15	1,82	1,17	1,36
11	Nusa Tenggara Timur	1,95	1,79	1,64	2,07	1,69
12	Kalimantan Barat	2,31	2,65	2,29	0,91	1,63
13	Kalimantan Tengah	3,43	3,88	2,99	1,79	2,33
14	Kalimantan Selatan	2,16	2,32	1,45	1,99	1,81
15	Kalimantan Timur	5,73	4,42	2,81	3,81	2,58
16	Sulawesi Utara	2,31	1,60	1,33	1,28	1,13
17	Sulawesi Tengah	3,86	2,87	2,57	1,95	1,67
18	Sulawesi Selatan	1,74	1,42	1,49	1,17	1,10
19	Sulawesi Tenggara	3,09	3,66	3,15	2,08	2,16
20	Gorontalo	-	-	1,59	2,26	1,62
21	Maluku	2,88	2,79	0,08	2,80	1,79
22	Maluku Utara	-	-	0,48	2,47	2,16
23	Papua Barat	-	-	-	3,71	2,61
24	Papua	2,67	3,46	3,22	5,39	1,95
Catatan:						
¹ Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2000–2010 untuk Aceh dihitung dengan menggunakan data Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) 2005 dan SP2010						
² Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Pertengahan tahun/Juni)						
³ Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2010–2014 untuk Kalimantan Timur merupakan gabungan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara						
Sumber :						
- Sensus Penduduk 1971, 1980 , 1990 , 2000 , 2010 dan Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS)						
- Data Dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia, BPS						
https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1268/rata-rata-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-provinsi-1971---2019.html						

Lampiran 3
Proyeksi Penduduk Menurut Provinsi

No	Provinsi	Tahun							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh	4.584.748	4.676.901	4.770.907	4.866.802	4.964.625	5.064.414	5.166.208	5.270.049
2	Sumatera Barat	4.910.404	4.974.730	5.039.899	5.105.921	5.172.809	5.240.573	5.309.224	5.378.775
3	Riau	5.681.811	5.828.970	5.979.940	6.134.820	6.293.712	6.456.719	6.623.948	6.795.509
4	Jambi	3.147.926	3.204.588	3.262.271	3.320.992	3.380.770	3.441.624	3.503.573	3.566.637
5	Bengkulu	1.744.510	1.773.992	1.803.973	1.834.460	1.865.462	1.896.989	1.929.048	1.961.649
6	Lampung	7.700.467	7.793.642	7.887.945	7.983.390	8.079.989	8.177.756	8.276.707	8.376.855
7	DI Yogyakarta	3.498.289	3.539.569	3.581.336	3.623.596	3.666.354	3.709.617	3.753.391	3.797.681
8	Banten	10.869.263	11.111.648	11.359.438	11.612.753	11.871.717	12.136.457	12.407.100	12.683.778
9	Bali	3.937.835	3.985.483	4.033.707	4.082.515	4.131.914	4.181.910	4.232.511	4.283.724
10	Nusa Tenggara Barat	4.561.415	4.623.450	4.686.329	4.750.063	4.814.664	4.880.143	4.946.513	5.013.786
11	Nusa Tenggara	4.762.984	4.843.478	4.925.333	5.008.571	5.093.216	5.179.291	5.266.821	5.355.831
12	Kalimantan Barat	4.467.638	4.540.460	4.614.470	4.689.685	4.766.127	4.843.815	4.922.769	5.003.010
13	Kalimantan Tengah	2.263.631	2.316.373	2.370.345	2.425.574	2.482.090	2.539.922	2.599.103	2.659.662
14	Kalimantan Selatan	3.692.258	3.759.088	3.827.127	3.896.398	3.966.923	4.038.724	4.111.825	4.186.249
15	Kalimantan Timur	3.644.814	3.738.850	3.835.313	3.934.264	4.035.768	4.139.891	4.246.700	4.356.265
16	Sulawesi Utara	2.296.254	2.322.201	2.348.442	2.374.980	2.401.817	2.428.957	2.456.405	2.484.162
17	Sulawesi Tengah	2.679.014	2.723.753	2.769.240	2.815.486	2.862.505	2.910.309	2.958.911	3.008.325
18	Sulawesi Selatan	8.123.159	8.212.513	8.302.851	8.394.182	8.486.518	8.579.870	8.674.249	8.769.665
19	Sulawesi Tenggara	2.280.810	2.330.075	2.380.405	2.431.822	2.484.349	2.538.011	2.592.832	2.648.837
20	Gorontalo	1.057.015	1.074.138	1.091.539	1.109.222	1.127.192	1.145.452	1.164.009	1.182.865
21	Maluku	1.560.956	1.588.897	1.617.338	1.646.288	1.675.757	1.705.753	1.736.286	1.767.366
22	Maluku Utara	1.060.510	1.083.417	1.106.818	1.130.726	1.155.149	1.180.101	1.205.591	1.231.632
23	Papua Barat	780.269	800.634	821.531	842.973	864.974	887.550	910.715	934.485
24	Papua	2.888.632	2.944.960	3.002.387	3.060.934	3.120.622	3.181.474	3.243.513	3.306.761

Catatan : Termasuk Penghuni Tidak Tetap (Tuna Wisma, Pelaut, Rumah Perahu, dan Penduduk Ulang-alik/Ngelaju)

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995, BPS

Lampiran 4				
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Provinsi (Dalam Ribu Rupiah)				
No	Provinsi	2016	2017	2018
1	Aceh	2.060.180.944	2.276.305.569	2.359.385.394
2	Sumatera Barat	1.964.148.976	2.134.010.520	2.275.090.069
3	Riau	3.110.656.140	3.360.008.975	3.638.995.740
4	Jambi	1.192.291.685	1.580.533.417	1.656.569.597
5	Bengkulu	731.556.734	804.575.838	872.257.739
6	Lampung	2.368.796.251	2.750.582.686	2.864.235.753
7	DI Yogyakarta	1.673.749.196	1.851.977.303	2.041.096.405
8	Banten	5.463.156.734	5.756.371.374	6.329.138.234
9	Bali	3.041.195.258	3.398.472.278	3.718.499.635
10	Nusa Tenggara Barat	1.359.844.019	1.684.468.710	1.660.417.707
11	Nusa Tenggara Timur	995.186.121	1.047.491.567	1.095.269.979
12	Kalimantan Barat	1.664.338.992	1.945.647.317	2.194.867.824
13	Kalimantan Tengah	1.158.303.928	1.342.330.619	1.616.521.660
14	Kalimantan Selatan	2.499.530.556	2.848.892.104	3.557.316.629
15	Kalimantan Timur	4.029.364.844	4.588.752.896	5.800.270.286
16	Sulawesi Utara	981.044.550	1.146.674.828	1.253.804.978
17	Sulawesi Tengah	939.092.070	958.212.002	1.016.628.663
18	Sulawesi Selatan	3.449.561.308	3.679.083.944	3.948.349.252
19	Sulawesi Tenggara	756.302.657	806.253.870	903.949.001
20	Gorontalo	311.223.202	348.267.663	384.435.306
21	Maluku	600.781.690	430.866.044	465.779.724
22	Maluku Utara	280.111.908	327.469.790	358.325.359
23	Papua Barat	338.811.109	467.075.448	459.243.074
24	Papua	1.019.732.912	1.015.781.100	924.481.780

Sumber : Katalog BPS 7203002, Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2016-2019

Lampiran 5
APBD dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

No	Provinsi	APBD (Dalam Ribu Rupiah)				Pertumbuhan Ekonomi (%)		
		2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Aceh	12.611.106.738	12.653.240.528	14.813.722.417	15.335.355.058	0,33	17,07	3,52
2	Sumatera Barat	4.326.353.951	4.876.171.537	6.363.961.132	6.822.711.714	12,71	30,51	7,21
3	Riau	10.892.856.093	10.075.132.950	9.247.194.354	8.537.822.915	-7,51	-8,22	-7,67
4	Jambi	3.604.245.243	3.831.884.802	4.583.486.208	4.869.536.536	6,32	19,61	6,24
5	Bengkulu	2.436.203.581	2.941.650.415	3.243.391.495	3.202.896.451	20,75	10,26	-1,25
6	Lampung	4.898.783.191	5.691.234.106	7.017.854.660	7.633.025.849	16,18	23,31	8,77
7	DI Yogyakarta	3.911.107.930	4.270.072.673	5.279.617.119	5.790.570.834	9,18	23,64	9,68
8	Banten	9.236.214.977	9.786.470.314	10.265.222.255	11.072.775.454	5,96	4,89	7,87
9	Bali	5.873.708.294	5.923.695.124	6.478.848.756	6.701.282.417	0,85	9,37	3,43
10	Nusa Tenggara Barat	3.647.333.467	4.148.659.604	5.221.933.561	5.334.651.032	13,75	25,87	2,16
11	Nusa Tenggara	3.570.228.738	4.040.760.869	4.987.988.813	5.059.885.080	13,18	23,44	1,44
12	Kalimantan Barat	4.207.747.653	4.503.517.507	5.562.102.835	5.872.181.042	7,03	23,51	5,57
13	Kalimantan Tengah	3.546.928.958	3.587.854.404	4.412.596.407	5.250.299.628	1,15	22,99	18,98
14	Kalimantan Selatan	5.500.274.371	5.600.689.225	6.002.245.377	6.722.886.832	1,83	7,17	12,01
15	Kalimantan Timur	9.376.312.818	8.212.408.939	8.765.867.131	11.210.807.617	-12,41	6,74	27,89
16	Sulawesi Utara	2.818.667.730	2.985.770.053	3.891.526.350	4.080.736.277	5,93	30,34	4,86
17	Sulawesi Tengah	3.037.417.355	3.253.129.592	3.708.728.289	4.106.731.833	7,10	14,00	10,73
18	Sulawesi Selatan	6.415.560.016	7.292.544.165	9.220.494.698	9.444.558.008	13,67	26,44	2,43
19	Sulawesi Tenggara	2.886.689.888	3.260.316.797	4.033.244.218	4.138.218.328	12,94	23,71	2,60
20	Gorontalo	1.476.327.029	1.652.703.595	1.829.856.151	1.889.286.424	11,95	10,72	3,25
21	Maluku	2.304.536.102	2.831.652.375	2.845.811.476	3.083.520.339	22,87	0,50	8,35
22	Maluku Utara	1.856.130.531	2.061.128.353	2.312.013.102	2.516.318.068	11,04	12,17	8,84
23	Papua Barat	7.506.270.572	7.257.003.264	7.838.999.856	8.098.275.576	-3,32	8,02	3,31
24	Papua	12.986.631.901	13.071.335.657	14.016.056.996	14.134.105.608	0,65	7,23	0,84

Sumber : Katalog BPS 7203002, Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2016-2019

Lampiran 6				
Alokasi Dana Alokasi Khusus Menurut Provinsi (Dalam Ribu Rupiah)				
No	Provinsi	2016	2017	2018
1	Aceh	129.982.373	1.489.203.024	1.483.635.795
2	Sumatera Barat	1.180.338.806	1.699.580.667	1.784.401.030
3	Riau	1.421.530.289	1.607.851.462	1.641.194.885
4	Jambi	81.644.852	934.827.673	939.049.860
5	Bengkulu	468.362.410	635.034.086	110.698.384
6	Lampung	1.651.557.871	1.927.384.230	745.585.221
7	DI Yogyakarta	643.207.673	967.000.859	910.032.137
8	Banten	1.998.321.331	2.230.361.117	2.254.780.861
9	Bali	844.872.363	1.105.556.047	1.042.840.035
10	Nusa Tenggara Barat	1.090.304.456	1.384.626.963	1.412.965.950
11	Nusa Tenggara Timur	1.411.352.709	1.771.353.807	1.788.419.259
12	Kalimantan Barat	199.767.934	1.529.205.325	1.508.354.942
13	Kalimantan Tengah	241.247.658	644.057.087	750.824.890
14	Kalimantan Selatan	271.304.779	970.490.213	935.797.533
15	Kalimantan Timur	1.016.403.395	1.107.407.923	1.070.867.111
16	Sulawesi Utara	712.639.625	1.008.208.366	956.923.255
17	Sulawesi Tengah	835.621.352	976.155.892	948.918.647
18	Sulawesi Selatan	1.991.324.790	2.565.500.203	2.540.292.651
19	Sulawesi Tenggara	738.810.238	1.040.897.146	1.164.611.106
20	Gorontalo	319.995.163	393.157.693	369.637.026
21	Maluku	730.397.413	733.329.638	850.028.631
22	Maluku Utara	233.861.505	553.215.205	654.320.605
23	Papua Barat	489.419.916	338.947.588	444.560.372
24	Papua	328.169.423	1.029.337.888	918.901.192

Sumber : Katalog BPS 7203002, Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2016-2019

Lampiran 7				
Alokasi Belanja Modal dalam APBD Menurut Provinsi (Dalam Ribu Rupiah)				
No	Provinsi	2016	2017	2018
1	Aceh	2.284.852.301	2.168.299.050	2.503.941.130
2	Sumatera Barat	989.929.772	1.113.508.186	1.099.701.408
3	Riau	2.035.635.834	1.941.215.182	1.046.852.721
4	Jambi	945.539.007	895.648.009	784.723.908
5	Bengkulu	385.967.859	711.073.586	618.477.906
6	Lampung	1.005.779.805	1.451.484.673	1.729.327.433
7	DI Yogyakarta	836.873.712	1.046.730.142	1.134.962.616
8	Banten	1.334.133.583	1.349.687.360	1.362.550.904
9	Bali	730.924.238	660.432.834	440.710.162
10	Nusa Tenggara Barat	696.681.646	1.153.481.273	891.887.046
11	Nusa Tenggara Timur	602.299.046	482.924.905	529.761.034
12	Kalimantan Barat	474.804.656	954.917.378	676.487.480
13	Kalimantan Tengah	783.864.793	565.245.264	1.060.394.094
14	Kalimantan Selatan	1.348.396.270	1.388.008.913	1.117.196.742
15	Kalimantan Timur	1.571.814.627	938.335.385	1.829.259.943
16	Sulawesi Utara	745.899.590	757.829.988	721.402.643
17	Sulawesi Tengah	503.973.010	465.120.609	459.780.934
18	Sulawesi Selatan	856.863.744	1.051.187.331	1.081.805.775
19	Sulawesi Tenggara	751.917.123	903.121.912	795.197.262
20	Gorontalo	296.922.958	254.842.225	280.499.514
21	Maluku	832.064.350	545.780.528	601.514.658
22	Maluku Utara	592.691.071	561.613.740	513.352.287
23	Papua Barat	1.446.543.652	770.102.986	1.539.271.672
24	Papua	2.490.333.442	2.328.012.674	1.918.505.428

Sumber : Katalog BPS 7203002, Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2016-2019

Lampiran 8			
Temuan Kasus Kelemahan Pengendalian Intern Menurut Provinsi			
No	PROPINSI	TAHUN	KelemahanSPI
1	Aceh	2016	20
2	Sumatera Barat	2016	11
3	Riau	2016	8
4	Jambi	2016	3
5	Bengkulu	2016	14
6	Lampung	2016	18
7	DI Yogyakarta	2016	6
8	Banten	2016	38
9	Bali	2016	12
10	Nusa Tenggara Barat	2016	3
11	Nusa Tenggara Timur	2016	3
12	Kalimantan Barat	2016	22
13	Kalimantan Tengah	2016	0
14	Kalimantan Selatan	2016	2
15	Kalimantan Timur	2016	3
16	Sulawesi Utara	2016	0
17	Sulawesi Tengah	2016	10
18	Sulawesi Selatan	2016	16
19	Sulawesi Tenggara	2016	0
20	Gorontalo	2016	0
21	Maluku	2016	0
22	Maluku Utara	2016	1
23	Papua Barat	2016	5
24	Papua	2016	32
25	Aceh	2017	4
26	Sumatera Barat	2017	2
27	Riau	2017	0
28	Jambi	2017	37
29	Bengkulu	2017	3
30	Lampung	2017	6
31	DI Yogyakarta	2017	1
32	Banten	2017	0
33	Bali	2017	14
34	Nusa Tenggara Barat	2017	20
35	Nusa Tenggara Timur	2017	13

36	Kalimantan Barat	2017	29
37	Kalimantan Tengah	2017	5
38	Kalimantan Selatan	2017	19
39	Kalimantan Timur	2017	28
40	Sulawesi Utara	2017	15
41	Sulawesi Tengah	2017	11
42	Sulawesi Selatan	2017	31
43	Sulawesi Tenggara	2017	16
44	Gorontalo	2017	15
45	Maluku	2017	4
46	Maluku Utara	2017	1
47	Papua Barat	2017	15
48	Papua	2017	28
49	Aceh	2018	6
50	Sumatera Barat	2018	15
51	Riau	2018	19
52	Jambi	2018	4
53	Bengkulu	2018	1
54	Lampung	2018	7
55	DI Yogyakarta	2018	6
56	Banten	2018	11
57	Bali	2018	18
58	Nusa Tenggara Barat	2018	20
59	Nusa Tenggara Timur	2018	35
60	Kalimantan Barat	2018	31
61	Kalimantan Tengah	2018	0
62	Kalimantan Selatan	2018	27
63	Kalimantan Timur	2018	26
64	Sulawesi Utara	2018	7
65	Sulawesi Tengah	2018	22
66	Sulawesi Selatan	2018	6
67	Sulawesi Tenggara	2018	29
68	Gorontalo	2018	1
69	Maluku	2018	8
70	Maluku Utara	2018	4
71	Papua Barat	2018	5
72	Papua	2018	16
Sumber : IHPS 2017, 2018, 2019			

Lampiran 9

Data SPSS

PROPINSI	TAHUN	Kompleksitas	Ukuran	Pertumbuhan	PAD	DAK	BelanjaModal	KelemahanSPI
Aceh	2016	289	5064414	0,33	2060180944	129982373	2284852301	20
Sumatera Barat	2016	179	5240573	12,71	1964148976	1180338806	989929772	11
Riau	2016	164	6456719	-7,51	3110656140	1421530289	2035635834	8
Jambi	2016	138	3441624	6,32	1192291685	81644852	945539007	3
Bengkulu	2016	127	1896989	20,75	731556734	468362410	385967859	14
Lampung	2016	227	8177756	16,18	2368796251	1651557871	1005779805	18
DI Yogyakarta	2016	78	3709617	9,18	1673749196	643207673	836873712	6
Banten	2016	155	12136457	5,96	5463156734	1998321331	1334133583	38
Bali	2016	57	4181910	0,85	3041195258	844872363	730924238	12
Nusa Tenggara Barat	2016	116	4880143	13,75	1359844019	1090304456	696681646	3
Nusa Tenggara Timur	2016	306	5179291	13,18	995186121	1411352709	602299046	3
Kalimantan Barat	2016	174	4843815	7,03	1664338992	199767934	474804656	22
Kalimantan Tengah	2016	136	2539922	1,15	1158303928	241247658	783864793	0
Kalimantan Selatan	2016	152	4038724	1,83	2499530556	271304779	1348396270	2
Kalimantan Timur	2016	103	4139891	-12,41	4029364844	1016403395	1571814627	3
Sulawesi Utara	2016	167	2428957	5,93	981044550	712639625	745899590	0
Sulawesi Tengah	2016	172	2910309	7,10	939092070	835621352	503973010	10
Sulawesi Selatan	2016	306	8579870	13,67	3449561308	1991324790	856863744	16
Sulawesi Tenggara	2016	213	2538011	12,94	756302657	738810238	751917123	0
Gorontalo	2016	77	1145452	11,95	311223202	319995163	296922958	0
Maluku	2016	118	1705753	22,87	600781690	730397413	832064350	0
Maluku Utara	2016	115	1180101	11,04	280111908	233861505	592691071	1
Papua Barat	2016	175	887550	-3,32	338811109	489419916	1446543652	5
Papua	2016	470	3181474	0,65	1019732912	328169423	2490333442	32

Aceh	2017	289	5166208	17,07	2276305569	1489203024	2168299050	4
Sumatera Barat	2017	179	5309224	30,51	2134010520	1699580667	1113508186	2
Riau	2017	164	6623948	-8,22	3360008975	1607851462	1941215182	0
Jambi	2017	138	3503573	19,61	1580533417	934827673	895648009	37
Bengkulu	2017	127	1929048	10,26	804575838	635034086	711073586	3
Lampung	2017	227	8276707	23,31	2750582686	1927384230	1451484673	6
DI Yogyakarta	2017	78	3753391	23,64	1851977303	967000859	1046730142	1
Banten	2017	155	12407100	4,89	5756371374	2230361117	1349687360	0
Bali	2017	57	4232511	9,37	3398472278	1105556047	660432834	14
Nusa Tenggara Barat	2017	116	4946513	25,87	1684468710	1384626963	1153481273	20
Nusa Tenggara Timur	2017	306	5266821	23,44	1047491567	1771353807	482924905	13
Kalimantan Barat	2017	174	4922769	23,51	1945647317	1529205325	954917378	29
Kalimantan Tengah	2017	136	2599103	22,99	1342330619	644057087	565245264	5
Kalimantan Selatan	2017	152	4111825	7,17	2848892104	970490213	1388008913	19
Kalimantan Timur	2017	103	4246700	6,74	4588752896	1107407923	938335385	28
Sulawesi Utara	2017	167	2456405	30,34	1146674828	1008208366	757829988	15
Sulawesi Tengah	2017	172	2958911	14,00	958212002	976155892	465120609	11
Sulawesi Selatan	2017	306	8674249	26,44	3679083944	2565500203	1051187331	31
Sulawesi Tenggara	2017	213	2592832	23,71	806253870	1040897146	903121912	16
Gorontalo	2017	77	1164009	10,72	348267663	393157693	254842225	15
Maluku	2017	118	1736286	0,50	430866044	733329638	545780528	4
Maluku Utara	2017	115	1205591	12,17	327469790	553215205	561613740	1
Papua Barat	2017	175	910715	8,02	467075448	338947588	770102986	15
Papua	2017	470	3243513	7,23	1015781100	1029337888	2328012674	28

Aceh	2018	289	5270049	3,52	2359385394	1483635795	2503941130	6
Sumatera Barat	2018	179	5378775	7,21	2275090069	1784401030	1099701408	15
Riau	2018	164	6795509	-7,67	3638995740	1641194885	1046852721	19
Jambi	2018	138	3566637	6,24	1656569597	939049860	784723908	4
Bengkulu	2018	127	1961649	-1,25	872257739	110698384	618477906	1
Lampung	2018	227	8376855	8,77	2864235753	745585221	1729327433	7
DI Yogyakarta	2018	78	3797681	9,68	2041096405	910032137	1134962616	6
Banten	2018	155	12683778	7,87	6329138234	2254780861	1362550904	11
Bali	2018	57	4283724	3,43	3718499635	1042840035	440710162	18
Nusa Tenggara Barat	2018	116	5013786	2,16	1660417707	1412965950	891887046	20
Nusa Tenggara Timur	2018	306	5355831	1,44	1095269979	1788419259	529761034	35
Kalimantan Barat	2018	174	5003010	5,57	2194867824	1508354942	676487480	31
Kalimantan Tengah	2018	136	2659662	18,98	1616521660	750824890	1060394094	0
Kalimantan Selatan	2018	152	4186249	12,01	3557316629	935797533	1117196742	27
Kalimantan Timur	2018	103	4356265	27,89	5800270286	1070867111	1829259943	26
Sulawesi Utara	2018	167	2484162	4,86	1253804978	956923255	721402643	7
Sulawesi Tengah	2018	172	3008325	10,73	1016628663	948918647	459780934	22
Sulawesi Selatan	2018	306	8769665	2,43	3948349252	2540292651	1081805775	6
Sulawesi Tenggara	2018	213	2648837	2,60	903949001	1164611106	795197262	29
Gorontalo	2018	77	1182865	3,25	384435306	369637026	280499514	1
Maluku	2018	118	1767366	8,35	465779724	850028631	601514658	8
Maluku Utara	2018	115	1231632	8,84	358325359	654320605	513352287	4
Papua Barat	2018	175	934485	3,31	459243074	444560372	1539271672	5
Papua	2018	470	3306761	0,84	924481780	918901192	1918505428	16

Lampiran 10
Hasil Olah Data SPSS

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KelemahanSPI	72	0	38	12,06	10,715
Kompleksitas	72	57	470	175,58	90,367
Ukuran Pemerintah	72	887550	12683778	4260372,67	2647653,732
Pertumbuhan	72	-12,41	30,51	9,6733	9,45046
PAD	72	280111908	6329138234	1943527742	1450346461
DAK	72	81644852	2565500203	1040288469	591801435,7
BelanjaModal	72	254842225	2503941130	1024178818	548086527,8
Valid N (listwise)	72				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	9,24915488
Most Extreme Differences	Absolute	,091
	Positive	,091
	Negative	-,057
Test Statistic		,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

3. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,912	3,419		,267	,791		
	Kompleksitas	,073	,020	,612	3,679	,000	,415	2,411
	Ukuran Pemerintah	-.00000153831	,000	-,380	-1,52	,133	,183	5,456
	Pertumbuhan	.10181548858	,129	,090	,787	,434	,880	1,137
	PAD	.00000000535	,000	,724	3,100	,003	,210	4,753
	DAK	.00000000010	,000	,005	,027	,978	,302	3,308
	BelanjaModal	-.00000000636	,000	-,325	-2,05	,044	,455	2,196

a. Dependent Variable: KelemahanSPI

4. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,503	1,876		1,868	,066
	Kompleksitas	,015	,011	,244	1,396	,167
	Ukuran Pemerintah	.00000072572	,000	,343	1,307	,196
	Pertumbuhan	-.01280828911	,071	-,022	-,180	,857
	PAD	-.00000000025	,000	-,065	-,265	,792
	DAK	.00000000064	,000	,068	,331	,741
	BelanjaModal	-.00000000194	,000	-,190	-1,142	,258

a. Dependent Variable: ABS_RES

5. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,505 ^a	,255	,186	9,667	2,077

a. Predictors: (Constant), BelanjaModal, DAK, Pertumbuhan, Kompleksitas, PAD, Ukuran Pemerintah

b. Dependent Variable: KelemahanSPI

6. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	,912	3,419		,267	,791
	Kompleksitas	,073	,020	,612	3,679	,000
	Ukuran Pemerintah	-,0000015383	,000	-,380	-1,520	,133
	Pertumbuhan	,1018154886	,129	,090	,787	,434
	PAD	,0000000053	,000	,724	3,100	,003
	DAK	,0000000001	,000	,005	,027	,978
	BelanjaModal	-,0000000064	,000	-,325	-2,050	,044

a. Dependent Variable: KelemahanSPI

7, Uji Nilai F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2077,950	6	346,325	3,706	,003 ^b
	Residual	6073,827	65	93,443		
	Total	8151,778	71			

a. Dependent Variable: KelemahanSPI

b. Predictors: (Constant), BelanjaModal, DAK, Pertumbuhan, Kompleksitas, PAD, Ukuran Pemerintah

8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,505 ^a	,255	,186	9,667

a. Predictors: (Constant), BelanjaModal, DAK, Pertumbuhan, Kompleksitas, PAD, Ukuran Pemerintah